

JOKOWI DI DEPAN DAN BELAKANG PANGGUNG POLITIK: DRAMATURGI TERHADAP PELEMAHAN KPK

M. Ahsan Ridhoi⁽¹⁾, Leovina Prinanda Putri⁽²⁾, dan Novita Anggraini⁽³⁾

Magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Paramadina

Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta, 12790, Indonesia

Email: (1) muhammad.ridhoi@students.paramadina.ac.id, (2) leovina.p.putri@gmail.com, (3) novita.anggraini@students.paramadina.ac.id

Abstrak

Indonesia reached a turning point in its implementation of eradicating corruption after the fall of the Soeharto regime in 1998. Corruption then became a sexy issue that became the commitment of politicians and public officials. Jokowi appeared and became a favorite media. In the 2014 presidential election campaign, Jokowi carried 9 Nawa Cita promises, on the 4th point containing: "rejecting weak countries by reforming the system and law enforcement that is free of corruption, with dignity, and trustworthy". Eradication of corruption in Indonesia has not been fully effective. This shows commitment to eradicating corruption and strengthening the KPK through words like what Jokowi did, only dramaturgy to deal with communication and self-image crises. Jokowi does not want to present himself as supporting the revision of the KPK Law. Jokowi seems to be with the people, united to support the strengthening of the KPK. By collecting qualitative data related to a collection of statements by President Jokowi about strengthening the KPK in a number of mass media in the 2014-2021 period, the researcher uses the Front Stage and Back Stage theories by Erving Goffman. This study explains how Jokowi uses him as head of state and also as part of the people based on the best version of himself.

Keywords: KPK, Jokowi, dramaturgy, front stage-back stage, Erving Goffman

1. PENDAHULUAN

Lema penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berulang kali disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jelang pemilihan umum presiden (Pilpres) 2014 lalu, misalnya, dalam sebuah wawancara khusus dengan NET. TV, ia mengungkapkan komitmen memperkuat lembaga antirasuah bila terpilih. Saat itu Jokowi menjadi calon presiden (Capres) nomor urut dua melawan Prabowo Subianto yang mendapat nomor urut satu.

Kepada pewarta Marissa Anita dari NET. TV, Jokowi menyatakan, "kita berkomitmen penguatan KPK itu harus *real*. Penguatan KPK itu harus *real*." Ia pun menambahkan bentuk komitmen tersebut dengan akan menambah anggaran KPK hingga sepuluh kali lipat bila pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7 persen. Ia pun berjanji akan menambah penyidik KPK.

"Kemudian penyidiknya tambah, kekurangan berapa? Seribu penyidik? Tambah seribu penyidik. Memang harus tegas, kalau kita mau serius, ya harus seperti itu. Jangan semua ragu dan basa-basi, harus tegas," kata Jokowi. (NET. TV, 2014)

Dalam poin keempat Nawa Cita—sembilan janji kampanye yang menjadi jualan utama Jokowi pada Pilpres 2014, ia pun menyinggung terkait pemberantasan korupsi yang berkelindan dengan komitmen penguatan KPK. Poin tersebut berbunyi, “menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. (Kompas.com, 2014)

Setiap terjadi polemik terkait masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, Jokowi pun selalu mengungkap kembali komitmennya untuk memperkuat KPK. Pada 13 September 2019 lalu, ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hendak merevisi Undang-Undang KPK yang mendapat penolakan dari publik, ia kembali memberi pernyataan serupa.

Kala itu, Jokowi menyampaikan, “Sekali lagi, kita jaga agar KPK lebih kuat dibanding lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.” (I-News, 2019)

Ketika menyikapi polemik pemecatan 75 anggota KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), Jokowi pun kembali menggunakan lema penguatan lembaga antirasuah dalam meresponnya. Pada 17 Mei 2021 lalu, ia mengatakan TWK semestinya menjadi instrumen untuk memperbaiki KPK, bukan menjadi alat memecat 75 anggota tersebut. (Kompas.com, 2021)

Korupsi memang menjadi isu yang seksi sejak negara ini merdeka. Selama itu pula, politikus yang bertarung di ranah pemilu dan pejabat publik di negeri ini selalu jual komitmen untuk memberantas korupsi, termasuk menguatkan KPK, sebagaimana dilakukan Jokowi.

Pemaknaan korupsi yang mendekati relevan, adalah berdasarkan teori *Principal Agent*. Bahwa korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang diberikan oleh *principal* oleh *agent* untuk kepentingan pribadi. (Hamilton-Hart, 2001) *Principal*, dalam hal ini adalah rakyat. Sementara *agent* bisa berupa pejabat publik atau aparatur sipil negara (ASN).

Indonesia mencapai titik balik dalam pemberantasan korupsi usai tumbang rezim Soeharto pada 1998 lalu, ditandai dengan disahkannya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001.

Titik terang pemberantasan korupsi di Indonesia pun semakin terlihat ketika disahkannya UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dasar hukum yang menjadikan KPK sebagai *leading sector* pemberantasan korupsi di negeri ini. Aturan tersebut kemudian berubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 yang sempat menimbulkan polemik dalam pembahasannya lantaran dinilai bisa melemahkan KPK.

Namun, pemberantasan korupsi di Indonesia belum sepenuhnya efektif sampai saat ini. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurun tiga poin pada 2020 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 37 poin. Indonesia pun berada di peringkat ke-102 dari 180 negara dunia. (Katadata.co.id, 2021)

Hal itu menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi dan penguatan KPK melalui ucapan, seperti dilakukan Jokowi, hanyalah dramaturgi untuk mengelola krisis komunikasi. Teori dramaturgi mulanya dikemukakan oleh Erving Goffman, seorang sosiolog dari University of California, Berkeley, dalam bukunya *The Presentation of Self in Everyday Life*.

Goffman berpendapat bahwa interaksi sosial individu selayaknya sebuah panggung drama. Individu melakukan negosiasi konstan dalam panggung tersebut untuk mencapai tujuannya. (Goffman, 1956)

Guna melihat interaksi seseorang dalam situasi tertentu, Goffman membaginya menjadi dua, yakni *front stage* atau yang ditampilkan di muka dan *back stage* atau yang ditampilkan di belakang panggung. Pusat

perhatian Goffman dalam melihat keduanya adalah pada pertemuan tatap muka atau *co-presence* yang terlihat dari cara seseorang tersebut memberikan impresi kepada audiensnya. (Goffman, 1956)

Goffman memandang bahwa kesan pertama dalam komunikasi sangat penting di kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki status sosial tertentu seperti Jokowi, menurutnya, biasanya sudah memiliki bentuk *front* tertentu. (Goffman, 1956)

Hal tersebut berbeda dengan seseorang yang memiliki status lebih rendah dibandingkan audiensnya. Menurut Goffman, seseorang tersebut akan cenderung mengambil inisiatif dalam interaksi untuk mempersepsikan keadaan. (Goffman, 1956)

Dalam konteks Jokowi, di bawah payung pemerintahan demokratis dan konstitusi Indonesia, seorang presiden dalam kadar tertentu memiliki status politik lebih tinggi dari rakyat. Namun, di sisi lain ia adalah pelayan yang mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan jabatan tersebut sehingga harus terus-menerus mengambil inisiatif agar mampu mempersepsikan keadaan sesuai kepentingannya.

Penelitian ini akan membahas cara dramaturgi Jokowi dalam menyikapi isu korupsi dengan fokus pada lema penguatan KPK seperti yang kerap disampaikannya. Bagaimana cara Jokowi berkomunikasi di *front stage* dan *back stage*?

2. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yakni memberikan gambaran pada detail spesifik suatu situasi tertentu, dalam hal ini adalah mendeskripsikan bagaimana dramaturgi Presiden Jokowi dalam menyikapi isu korupsi melalui beberapa pernyataannya untuk memperkuat KPK.

Hal ini sebagaimana menurut W. Laurence Neuman dalam bukunya *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*, bahwa fokus pertanyaan penelitian model ini adalah pada pertanyaan “bagaimana itu bisa terjadi?” dan “siapa yang terlibat?”. Neuman pun menilai metode deskriptif adalah yang terbaik untuk sebuah penelitian sosial. (Neuman, 2007)

Pengumpulan data yang kami gunakan adalah secara kualitatif dengan mengumpulkan pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi terkait penguatan KPK di sejumlah media massa dalam rentang 2014-2021.

Teori dramaturgi, seperti yang telah disinggung sebelumnya, berangkat dari pendapat Erving Goffman bahwa interaksi sosial individu selayaknya sebuah panggung drama. Individu melakukan negosiasi konstan dalam panggung tersebut untuk mencapai tujuannya. Ia menekankan teori ini pada interaksi tatap muka (*co-presence*). (Goffman, 1956)

Goffman juga menitikberatkan *performance* atau penampilan dalam interaksi sosial. Ia mendefinisikan *performance* sebagai aktivitas individu dalam situasi tertentu untuk memengaruhi individu lain dengan cara apapun. (Goffman, 1956)

Dengan kata lain, Goffman berasumsi bahwa individu akan membuat tindakan yang mendukung perannya dalam sebuah interaksi sosial dan pesan yang disampaikannya diakui orang lain. Hal ini membuat identitas individu tak ajeg, tapi tergantung bagaimana ia merepresentasikan dirinya ketika berinteraksi dengan orang lain. Bergantung pula pada kondisi psikologisnya saat itu. (Goffman, 1956)

Goffman membagi dua peran untuk melihat cara individu berinteraksi dengan orang lain. *Pertama*, adalah *front stage* atau panggung depan tempat individu menampilkan perannya dalam sebuah interaksi secara terus-menerus yang sesuai keinginannya untuk memengaruhi pengamat. (Goffman, 1956)

Front stage juga terbagi menjadi dua, yakni *personal front* dan *setting*. *Personal front* adalah segala hal yang berkaitan dengan ciri fisik individu tersebut, seperti bahasa verbal, gerak-gerik tubuh, mimik muka, dan lain sebagainya. Sementara *setting* adalah situasi yang menunjang persona individu tersebut, seperti dokter membutuhkan ruang operasi dan petani memerlukan sawah dalam interaksi sosialnya. (Goffman, 1956)

Goffman menilai status sosial sangat memengaruhi *front stage* individu. Pada individu yang memiliki status sosial lebih tinggi ketimbang lawan interaksinya cenderung telah memiliki bentuk *front* tertentu. (Goffman, 1956)

Sebaliknya, pada individu yang berstatus lebih rendah dari lawan interaksinya, seperti seorang pelayan kepada pelanggannya, maka ia memiliki *front* terbatas. Oleh karena itu, individu tersebut akan cenderung melakukan inisiatif dalam komunikasi untuk mempersiapkan keadaan. (Goffman, 1956)

Merujuk kepada perbedaan status tersebut, maka dapat dikatakan seorang yang berstatus lebih tinggi lebih memiliki keleluasaan dalam memilih *front* untuk mempersiapkan keadaan sesuai keinginannya. Individu tersebut lebih mudah memengaruhi audiensnya ketimbang yang memiliki status lebih rendah. (Goffman, 1956)

Kedua, *back stage* atau peran yang ditampilkan individu di belakang panggung. Hal ini mencakup tindakan individu yang tidak ingin diketahui oleh lawan interaksinya. Menurut Goffman, individu menjadi diri sendiri ketika berada di belakang layar dan ia memainkan skenario pertunjukan bersama timnya. (Goffman, 1956)

Disebutkan sebagai suatu tim, lantaran Goffman berpendapat bahwa sebuah pertunjukan juga terjalin karena sebuah kerjasama intim di antara beberapa personel. Dalam hal ini, ia mencontohkan interaksi sosial individu dalam birokrasi. Bahwa kemudian individu dalam birokrasi tersebut yang muncul, tapi ia menampilkan peran sesuai dengan konsensus timnya. (Goffman, 1956)

Meski demikian, Goffman menyebut bahwa kesan realitas yang ditampilkan dalam sebuah pertunjukan adalah rapuh dan bisa runtuh oleh kesalahan kecil. Oleh karena itu, dalam *back stage*, ia mengembangkan konsep-konsep lain untuk melihatnya, yakni *dramatic realization*, *mystification*, dan *maintenance of expressive control*. (Goffman, 1956)

Dramatic realization, menurut Goffman, adalah cara individu menanamkan keberadaannya di hadapan audiens secara dramatis untuk mengonfirmasi fakta yang ingin disampaikannya secara jelas. Hal ini membuat informasi dari individu tersebut nampak signifikan selama interaksi. (Goffman, 1956)

Goffman menyontohkan wasit *baseball* ketika memberikan keputusan akan suatu kejadian dalam pertandingan. Menurutnya, wasit tersebut harus memberikan kesan mendalam bahwa keputusannya benar dengan tidak berpatokan pada keyakinannya sendiri, melainkan kepada audiensnya atau dalam hal ini pemain *baseball*. (Goffman, 1956)

Lalu, *mystification* menurut Goffman adalah cara bagi individu menjaga jarak dengan audiensnya. Hal ini dilakukan agar audiens tak mampu melihat secara keseluruhan tentang jati diri individu tersebut. Dengan begitu, persepsi audiens terhadap kesan yang sengaja ditampilkan individu tidak runtuh. Sebab, menurutnya, seringkali kegagalan individu dalam menguasai situasi di depan audiens lantaran tak mampu membedakan mana informasi yang mesti disampaikan dan tidak. (Goffman, 1956)

Sementara, menurut Goffman, di antara audiens kerap terjalin kooperasi yang memungkinkan mereka mendobrak penampilan yang diciptakan individu. Ketika itu terjadi, audiens akan cenderung membentuk persepsinya sendiri terkait situasi tertentu. Drama individu tersebut dalam interaksi pun bisa gagal. (Goffman, 1956)

Maintenance of expressive control adalah cara individu mengontrol kemungkinan terjadi misinterpretasi oleh audiens dari tanda yang telah disampaikan. Misinterpretasi tersebut bisa jadi kecil dan memengaruhi sebagian kecil audiens, tapi menurut Goffman, itu juga bisa membuat audiens yang telah yakin menjadi skeptis kembali. Hal ini lantaran dramaturgi termasuk ke dalam teori interaksi simbolik, sehingga sekecil apapun tanda yang ditampilkan sangat memengaruhi pola interaksi. (Goffman, 1956)

Goffman menyebut pengelolaan keadaan tersebut sebagai tanggung jawab sinekdoks. Lebih baik individu tersebut memperbaiki kesalahan tersebut dengan sebuah pencitraan artistik. Dengan demikian, audiens akan kembali yakin dengan penampilan individu tersebut dan tak sampai merusak keseluruhan penampilan. (Goffman, 1956)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Front Stage Jokowi Memperkuat KPK

Mengingat dramaturgi fokus pada interaksi tatap muka, maka dalam konteks penelitian ini yang akan dilihat adalah pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi ke publik terkait komitmen memperkuat KPK. Pernyataan-pernyataan tersebut ditemukan melalui dokumentasi media massa dalam periode 2014-2021, yakni dari sebelum ia menjabat sebagai presiden sampai kini.

Pernyataan pertama yang dapat kami dokumentasikan adalah ketika Jokowi melakukan wawancara khusus dengan Marissa Anita dari NET. TV pada 30 Juni 2014 atau sebelum Pemilu Presiden 2014. Saat itu, pernyataannya adalah sebagai berikut:

Marissa: Bagaimana rencana Anda terkait KPK yang selama ini merasa jumlah penyidik saja terseok-seok?

Jokowi: Ya, ini masalah komitmen. Kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real.

Marissa: Seperti apa?

Jokowi: Tambah anggarannya, kalau perlu hitungan kami kalau ekonomi bisa tumbuh di atas 7 persen, bisa 10 kali lipat. Tambah. Kemudian penyidiknya tambah, kekurangan berapa? Seribu penyidik? Tambah seribu penyidik. Memang harus tegas, kalau kita mau serius, ya, harus seperti itu.

Jangan semua ragu dan basa-basi. Harus tegas. (NET. TV, 2014)

Jokowi pun menuangkan komitmennya untuk memberantas korupsi yang berkelindan dengan penguatan KPK dalam Nawa Cita. Pada poin keempat Nawa Cita tertulis, “menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. (Kompas.com, 2014)

Merujuk kepada konsep *front stage* Goffman, melalui pernyataannya kepada Marissa dan draf Nawa Cita, terlihat bahwa Jokowi ingin mengesankan diri sebagai calon presiden yang peduli dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dengan memperkuat lembaga antirasuah.

Personal front Jokowi saat itu jelas sebagai calon presiden yang dekat dengan rakyat. Terbukti dengan jargon kampanyenya saat itu, yakni “Jokowi adalah Kita”. Untuk menebalkan hal itu, ia mengangkat isu penguatan KPK dan pemberantasan korupsi sebagai hal yang menjadi sorotan masyarakat.

Terlebih, saat itu Jokowi terkesan sebagai harapan baru. Ia dianggap tidak berasal dari jalinan dinasti politik lama mana pun, melainkan sebagai orang baru yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi Indonesia, termasuk dalam memberantas korupsi. Berbeda dengan lawannya saat itu, Prabowo Subianto, yang

dianggap masih menjadi bagian jaringan politik lama, yakni Orde Baru dengan statusnya sebagai mantan menantu Presiden Soeharto.

Rezim Soeharto dikenal korup. Kepemimpinan otoriter yang dilakukannya membuatnya leluasa membangun kuasa oligarki dan menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk memperkaya diri. Vedi R Hadiz menyebut era Soeharto sebagai masa oligarki sultanistik (Hadiz & Robinson, 2004). Dengan begitu, Prabowo yang masih terikat hubungan dengan Soeharto dinilai berpeluang besar menjadi serupa dan mengembalikan kekuasaan eksponen Orde Baru.

Dalam konteks inilah *front stage* Jokowi pada isu memberantas korupsi dan menguatkan KPK menjadi relevan untuk mencitrakan dirinya bersih. Sebagai calon presiden, ia pun menggunakan *setting* yang tepat, yakni melalui media massa dan naskah janji kampanye Nawa Cita untuk membentuk persepsi audiens yang dalam hal ini adalah calon pemilih terhadap dirinya.

Jokowi saat itu adalah *media darling*. Artinya, ia menjadi fokus sorotan media massa setelah kesuksesannya menjadi Walikota Solo selama dua periode dengan gaya kepemimpinan *blusukan*. Istilah *blusukan* merujuk kepada kebiasaan Jokowi turun langsung ke lapangan dan menemui masyarakat yang dipimpinya. Sebuah hal yang tak lumrah dilakukan para pejabat politik saat itu.

Dokumentasi selanjutnya adalah pernyataan Jokowi menyikap usulan revisi UU KPK oleh DPR. Pada 13 September 2019, seperti dilansir I-News, Jokowi antara lain menyatakan sebagai berikut:

Saya telah mempelajari dan mengikuti secara serius masukan yang diberikan oleh masyarakat, dari para pegiat anti-korupsi, para dosen, mahasiswa, dan masukan dari para tokoh bangsa. Karena itu ketika ada inisiatif dari DPR saat mengajukan RUU KPK, maka tugas pemerintah adalah meresponnya.

Kita tahu UU KPK telah berusia 17 tahun, perlu ada penyempurnaan secara terbatas, sehingga pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif. Sekali lagi, kita jaga agar KPK lebih kuat dibanding lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

Saya telah memberikan arahan kepada Kemenkumham menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi revisi UU KPK yang diinisiasi DPR.

Intinya KPK harus memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai. Dan harus lebih kuat dari lembaga lain untuk pemberantasan korupsi. (I-News, 2019)

Dari pernyataan tersebut, terlihat Jokowi menampilkan di muka bahwa menyerap aspirasi masyarakat terkait rencana revisi UU KPK. Saat itu, ramai penolakan revisi beleid tersebut dari pelbagai elemen masyarakat. Mereka menilai revisi tersebut hanya untuk melemahkan KPK, alih-alih memperkuat.

Salah satu kelompok yang menolak revisi UU KPK adalah Indonesia Corruption Watch (ICW). Melalui Koordinator Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz, pada 5 September 2019, ICW mendesak Presiden Jokowi menolak revisi beleid tersebut. ICW menilai revisi UU KPK adalah upaya pelemahan lembaga antirasuah secara sistematis. (Suara.com, 2019)

Dengan menyatakan telah mempertimbangkan aspirasi pelbagai elemen dalam pernyataannya, Jokowi terlihat berusaha mengesankan kembali dirinya masih bersama rakyat sebagai presiden yang terpilih melalui Pemilu. Begitupun, ia berusaha meyakinkan tetap berkomitmen memberantas korupsi dan menguatkan KPK sebagaimana janjinya pada pemilu 2014.

Sikap Jokowi tersebut membuktikan pendapat Goffman bahwa dalam dramaturgi, individu akan bernegosiasi terus-menerus dalam interaksi sosial agar menjaga kesan yang ingin ditampilkannya kepada audiens. Jokowi sebagai komunikator yang berstatus tinggi memiliki perangkat yang kukuh untuk melakukannya. Ia tidak perlu repot mencari medium negosiasi atau *setting*, apapun yang disampaikannya akan dikutip oleh media massa mengingat statusnya sebagai presiden.

Hal itu berbeda dengan kelompok masyarakat seperti ICW yang berstatus lebih rendah ketimbang Jokowi. Mereka mesti mengambil inisiatif komunikasi terlebih dahulu untuk dapat meyakinkan audiens dalam sebuah interaksi. Dalam hal ini, ICW berinisiatif terlebih dulu mendesak Jokowi agar menolak revisi UU KPK.

Sikap lain Jokowi yang berusaha menegaskan dirinya tak kehilangan komitmen memperkuat KPK adalah ketika menyikapi polemik pemecatan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sebagaimana dikutip dari *Kompas.com*, pada 17 Mei 2021, Jokowi menyatakan TWK tidak serta-merta menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Sebaliknya, hasil TWK seharusnya menjadi masukan untuk semakin memperkuat kinerja KPK.

Jokowi lantas menyatakan sebagai berikut:

Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. (Kompas.com, 2021)

Pemecatan 75 pegawai KPK tak lolos TWK menjadi polemik lantaran di dalam daftar tersebut terdapat nama beberapa penyidik KPK yang selama ini mampu mengusut kasus-kasus besar. Salah satunya Novel Baswedan yang mengusut megakorupsi KTP elektronik dengan salah satu tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Back Stage Jokowi

Seperti dikatakan Goffman, *back stage* adalah sikap yang ingin disembunyikan individu dari audiensnya. Di belakang panggung ini pula individu memainkan skenario bersama timnya. Dalam konteks analisis ini, kami akan melihat dari sikap-sikap Jokowi dan timnya yang berkebalikan dengan *front stage* yang ditampilkannya.

Dokumentasi pertama atas sikap Jokowi yang berkebalikan dengan pernyataannya ingin memperkuat KPK adalah pada kasus revisi UU KPK. Seperti dikutip dari *CNNIndonesia.com*, Jokowi meneken tiga peraturan presiden (Perpres) yang berkaitan dengan isi revisi UU KPK. Ketiganya adalah tentang dewan pengawas KPK, organisasi KPK, perubahan status pegawai KPK menjadi ASN. (Indonesia, 2019)

Penerbitan ketiga perpres tersebut disampaikan oleh Menseskab Pramono Anung pada 27 Desember 2019 atau tiga bulan berselang Jokowi menyatakan tetap berkomitmen menguatkan KPK. Sebagaimana menurut Goffman, dalam ranah *back stage* individu dibantu oleh timnya. Menteri dalam hal ini adalah tim presiden yang membantu melaksanakan tugas-tugas kepresidenan.

Dengan mendelegasikan menteri untuk mengumumkan ketiga Perpres tersebut, terlihat Jokowi tidak mau terlihat secara langsung ke audiens turut serta mendukung revisi UU KPK sehingga ia tetap terlihat konsisten di panggung depan menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Pada tindakan tersebut, Jokowi terlihat juga sedang memainkan yang disebut Goffman sebagai *mystification*. Ia berusaha menegaskan posisinya sebagai presiden yang mampu mendelegasikan menteri untuk kepentingan belakang layarnya dan membuat jarak status dengan publik pada isu ini. Bahwa ia ingin mengesankan diri bukan seorang yang mudah terpengaruh opini publik, melainkan ia lah yang memengaruhi publik dalam interaksi.

Sikap lain yang mencerminkan Jokowi sebetulnya tak sungguh-sungguh ingin menguatkan KPK adalah dengan masih berjalannya proses pembahasan revisi UU KPK hingga disahkan. Sementara, menurut Pasal 49 UU Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, proses pembuatan UU dari usulan DPR bisa terlaksana apabila pemerintah telah menugaskan menteri untuk memahaminya dengan DPR. (JDIH.ESDM.GO.Id, 2019)

Selain itu, pada UU KPK baru pasal-pasal kontroversial yang ditolak publik seperti keberadaan dewan pengawas masih tetap ada. Artinya perwakilan pemerintah yang terlibat dalam pembahasan revisi UU KPK tidak menolak pasal-pasal tersebut. Sebuah hal yang mengindikasikan Jokowi merestui proses tersebut, mengingat perwakilan pemerintah adalah menteri yang merupakan pembantu presiden.

Presiden Jokowi memang pada akhirnya tidak meneken UU KPK baru. Namun, sesuai UU Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, beleid tersebut tetap berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda-tangan presiden. (JDIH.ESDM.GO.Id, 2019)

Justru, sikap Jokowi tersebut dapat dimaknai sebagai yang disebut Goffman sebagai *maintenance of expressive control*. Jokowi berusaha tetap mengelola ekspresi publik usai tetap disahkannya UU KPK baru yang masih mengandung pasal-pasal kontroversial. Ia tidak ingin nampak di panggung depan sebagai seorang yang turut melemahkan KPK.

Keputusan Jokowi tak menandatangani beleid UU KPK baru juga membuktikan yang disebut Goffman sebagai *dramatic realization*. Ia berusaha menebalkan persepsi publik bahwa dirinya berkomitmen menguatkan KPK dan memberantas korupsi dengan menjejalkan fakta tak menyepakati beleid tersebut. Padahal, bila ia memang berkomitmen semestinya melakukannya dengan tidak mengirim delegasi untuk membahas revisi UU KPK.

Dampak dari tetap disahkannya revisi UU KPK adalah menurunnya kinerja komisi antirasuah. Pada 2018, KPK tercatat melakukan 164 penyelidikan, 199 penyidikan, 151 penuntutan, 104 putusan inkrah, dan mengeksekusi 113 putusan. Namun, sepanjang 2020 jumlahnya menurun drastis. KPK hanya melakukan 79 penyelidikan, 63 penyidikan, 73 penuntutan, 87 putusan inkrah, dan mengeksekusi 78 putusan. Sebuah hal yang mengindikasikan lembaga antirasuah kian melemah, tak seperti klaim Jokowi akan menguat pada masa kepemimpinannya. (Katadata.co.id, 2021)

Merujuk data Transparansi Internasional Indonesia (TII) yang dikutip *Katadata.co.id*, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pun turun tiga poin pada 2020 dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 37 poin. Indonesia berada di peringkat ke-102 dari 180 negara dunia. TII menggunakan skala 0-100 dalam menilai persepsi korupsi di satu wilayah. Artinya, poin tersebut mengindikasikan pemberantasan korupsi di Indonesia masih mengkhawatirkan. (Katadata.co.id, 2021)

Pada kasus pemecatan 75 anggota KPK tak lolos TWK, Jokowi pun tak terdokumentasikan di media massa mengambil tindakan lebih lanjut usai mengeluarkan pernyataannya. Sebuah hal yang mengindikasikan ia hanya berkepentingan mencitrakan diri, alih-alih serius memperkuat KPK seperti janjinya saat kampanye pemilu presiden.

4. KESIMPULAN

Korupsi tetap menjadi isu yang seksi bagi politikus dan pejabat publik untuk memperbaiki citra diri di hadapan masyarakat, khususnya ketika dalam kontestasi politik lima tahunan atau pemilu. Hal ini lantaran korupsi masih terus terjadi di Indonesia dan melibatkan banyak politikus serta pejabat publik.

Jokowi sebagai politikus tampak tahu betul terkait hal itu. Ia pun menggunakan isu penguatan KPK sebagai *leading sector* pemberantasan korupsi di Indonesia untuk mendapat citra baik dalam pemilu dan selama menjalankan jabatan presiden. Ia berulang kali menyatakan berkomitmen menguatkan KPK.

Akan tetapi, seperti dikatakan Goffman, interaksi sosial seperti halnya panggung drama. Individu berusaha menampilkan versi terbaik dirinya di panggung depan atau *front stage* sementara mereka bermain dengan timnya untuk menggerakkan agenda lain di panggung belakang atau *back stage* yang tidak diketahui oleh audiens di panggung depan.

Jokowi pun melakukannya. Ia tampil sebagai sosok yang menguatkan KPK dan memberantas korupsi di panggung depan. Akan tetapi, di panggung belakang bersama timnya ia turut serta melemahkan KPK dan berdampak pada menurunnya kinerja lembaga tersebut memberantas korupsi di negeri ini.

Berkaca kepada hal ini, maka setiap menyikapi pernyataan politikus dan pejabat publik, masyarakat tidak boleh *taken for granted*. Masyarakat mesti mampu melihatnya secara lebih kritis secara terus menerus. Dengan begitu, persepsi masyarakat akan lebih dominan dan para politikus serta pejabat publik tidak sampai berlebihan mencitrakan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- 2019, U. N. (2019, October 4). *JDIH.ESDM.GO.Id*. Retrieved June 2021, from JDIH.ESDM.GO.Id:
<https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20Nomor%2015%20Tahun%202019.pdf>
- Goffman, E. (1956). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Edinburgh: University of Edinburgh Social Science Research Centre.
- Hadiz, V., & Robinson, R. (2004). *The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia*. New York: RoutledgeCurzon.
- Hamilton-Hart, N. (2001). Anti-Corruption Strategies in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 65-82.
- Indonesia, C. (2019, December 12). *CNNIndonesia.com*. Retrieved June 2021, from CNNIndonesia.com:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191227141544-20-460374/jokowi-terbitkan-3-perpres-diklaim-untuk-memperkuat-kpk>
- I-News. (2019, 9 13). *inews.id*. Retrieved June 2021, from inesw.id:
<https://www.inews.id/news/nasional/pernyataan-lengkap-jokowi-tentang-usulan-ruu-kpk>
- Katadata.co.id. (2021, February 8). *Katadata.co.id*. Retrieved June 2021, from Katadata.co.id:
<https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/602098add9cef/apa-penyebab-kondisi-korupsi-di-indonesia-memburuk>
- Kompas.com. (2014, May 5). Retrieved June 2021, from
<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>

Kompas.com. (2021, May 18). Retrieved June 2021, from

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/18/06541231/saat-jokowi-tolak-twk-jadi-dasar-pemberhentian-75-pegawai-kpk?page=all>

Neuman, W. L. (2007). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education.

Suara.com. (2019, September 5). *Suara.com*. Retrieved June 2021, from Suara.com:

<https://www.suara.com/news/2019/09/05/145901/icw-minta-jokowi-konsisten-tolak-revisi-uu-kpk>

TV, N. (2014, June 30). *Channel YouTube Net TV*. Retrieved June 2021, from Channel YouTube Net TV:

<https://www.youtube.com/watch?v=IFkDO4ayeeQ>